
Pemanfaatan Kebijakan Satu Peta Untuk Aspek Mobilitas Penduduk (Belajar Dari Fenomena Mudik Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Muhammad Arif Fahrudin Alfana, Hidayati Nur Rohmah

Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada
arif.fahrudin@ugm.ac.id

Article History

accepted 05/08/2021

approved 15/08/2021

published 11/09/2021

Abstrak

Tujuan dari kajian ini adalah menjelaskan potensi pemanfaatan Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk tema kependudukan khususnya mobilitas penduduk. Kajian ini merupakan kajian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan memanfaatkan publikasi dari jurnal, laporan ilmiah, data publikasi dari badan/lembaga, serta sumber lain yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan peta tematik dalam bidang kependudukan, khususnya mobilitas penduduk, memiliki urgensi yang penting yang dapat dilaksanakan ke depan. Belajar dari fenomena mudik saat pandemi Covid-19 terjadi, pemanfaatan kebijakan satu peta untuk peta tematik pada aspek mobilitas penduduk memegang peranan penting. Peta mobilitas penduduk tersebut akan dijadikan sebagai dasar tracking penduduk sehingga pemerintah daerah asal maupun tujuan dapat melakukan berbagai macam perlindungan bagi para migran. Tantangan ke depan untuk pelaksanaannya adalah ketersediaan data mobilitas penduduk yang tidak akurat sehingga pemangku kepentingan perlu untuk membangun data mobilitas penduduk yang baik.

Kata kunci: *Kebijakan Satu Peta, mobilitas penduduk, Covid-19*

PENDAHULUAN

Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang komprehensif sebagai basis data yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, sebagai alat bantu perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan (Perpres Nomor 9 Tahun 2016). Dalam kebijakan tersebut terdapat berbagai macam rencana aksi yang didalamnya disebutkan berbagai kegiatan dan keluaran yang secara periodik ditargetkan penyelesaiannya. Diantara berbagai keluaran dalam rencana aksi tersebut antara lain adalah tersusunnya berbagai macam peta seperti peta RBI skala 1:50.000, peta batas administrasi provinsi skala 1:50.000, peta batas administrasi kabupaten/kota skala 1:50.000, peta batas administrasi desa/kelurahan skala 1:50.000, peta potensi desa minimal pada skala 1:10.000. Beberapa contoh peta yang disebutkan memiliki manfaat yang sangat penting utamanya jika dikaitkan dengan studi kependudukan atau demografi di suatu daerah.

Demografi sendiri merupakan studi tentang jumlah, struktur dan proses kependudukan yang terjadi di suatu daerah. Dari sisi proses, mobilitas merupakan sebuah kegiatan pergerakan penduduk yang memengaruhi kependudukan secara umum. Pengaruhnya dapat menambah ataupun mengurangi penduduk di suatu wilayah. Mobilitas penduduk ini juga berkaitan dengan kejadian penting yang saling memengaruhi. Dalam konteks pandemi, salah satunya adalah Covid-19, mobilitas penduduk dapat dipandang sebagai dampak akibat pandemi ataupun sebagai media dalam proses penyebaran pandemi dari satu wilayah ke wilayah lainnya (Ivakhnyuk, 2020; Lee et al., 2020; Song et al., 2020). Pada kajian ini penekanan bahasan lebih kepada migrasi sebagai dampak pandemi yang terjadi.

Mukhra, Krishan and Kanchan (2020) menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 telah memicu terjadinya mobilitas penduduk massal di India dari perkotaan menuju ke desa. Para migran yang melakukan migrasi ini, biasanya disebut sebagai migran internal, utamanya adalah para pekerja tidak terampil dan semi-terampil yang bekerja di perkotaan di India (Dandekar and Ghai, 2020). Bank Dunia bahkan menyebutkan lebih dari 40 juta migran internal telah terpengaruh karena COVID-19 dan sekitar 50.000 hingga 60.000 orang bermigrasi dari perkotaan ke pedesaan daerah asal dalam jangka waktu beberapa hari (Mukhra, Krishan and Kanchan, 2020).

Di Indonesia mobilitas penduduk juga menjadi dampak akibat pandemi Covid-19. Alfana, Pitoyo, Rohmah dan Laudiansyah (2020) menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan gelombang mobilitas penduduk khususnya adalah migran kembali. Kasus mudik (migrasi internal) saat pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu contoh terjadinya mobilitas penduduk massal yang diakibatkan dampak Covid-19. Para pemudik yang datang dari DKI Jakarta dan Jawa Barat melakukan mudik ke kampung halaman di Kabupaten Gunungkidul karena merasa khawatir kehidupan mereka terancam. Ancaman tersebut baik berupa kondisi kesehatan maupun kondisi ekonomi karena sudah tidak bekerja atau lainnya.

Terjadinya fenomena mudik saat pandemi Covid-19 ternyata menyingkap salah satu fakta penting bahwa pendataan mobilitas penduduk belum baik. Klaim ini didasarkan pada berbagai kasus yang terjadi di lapangan dimana pendataan mobilitas penduduk belum dapat dikatakan baik. Contoh di Blora misalnya dimana bantuan untuk para perantau saat pandemi Covid-19 belum maksimal dilakukan karena pemerintah Blora belum memiliki data perantau yang menjadi data dasar kebijakan pemberian bantuan (Budi, 2020; Chandra, 2020). Laporan Vitorio (2020) dan Djulfaroh (2020) juga menunjukkan kondisi serupa dimana bantuan bagi para perantau tidak bisa diberikan karena tidak memiliki data mobilitas penduduk yang akurat. Sehingga Alfana,dkk (2020) menyimpulkan bahwa urgensi pendataan penduduk bagi para migran internal yang melakukan mobilitas penduduk menjadi sangat penting.

Kebijakan satu peta yang nantinya menghasilkan berbagai macam peta tematik akan memberikan input/masukan yang bagus untuk aspek mobilitas penduduk. Tersedianya luaran-luaran seperti peta desa/kelurahan, peta kabupaten, peta provinsi, serta peta potensi desa menjadi pondasi yang sangat baik dalam kajian aspek mobilitas penduduk. Hal ini dikarenakan kajian mobilitas penduduk sangat erat kaitannya dengan daerah asal dan daerah tujuan serta potensi atau kelemahan/ancaman yang ada di daerah asal dan daerah tujuan. Oleh karena itu pemanfaatan kebijakan satu peta untuk aspek mobilitas penduduk dapat dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pemanfaatan kebijakan satu peta dalam studi mobilitas penduduk terkhusus belajar dari kejadian pandemi Covid-19. Fenomena mobilitas yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul dan respon pemerintah akan digunakan sebagai input yang baik bagi terlaksananya pemanfaatan kebijakan satu peta untuk aspek mobilitas penduduk.

METODE

Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan tinjauan literatur. Kajian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang berjudul Permasalahan Manajemen Bencana Di Indonesia: Urgensi Pendataan Para Perantau, Belajar Dari Kondisi Selama Pandemi Covid-19. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan memanfaatkan publikasi dari jurnal, laporan ilmiah, data publikasi dari badan/lembaga, serta sumber lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini membahas pemanfaatan kebijakan satu peta untuk aspek mobilitas penduduk dengan dua bahasan utama. Pertama membahas fenomena mobilitas penduduk selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul DIY. Kedua membahas kebijakan satu peta dan pemanfaatan luaran yang dihasilkan untuk dimanfaatkan dalam studi mengenai mobilitas penduduk.

Fenomena Mobilitas Penduduk Massal di Kabupaten Gunungkidul Selama Awal Pandemi Covid-19 dan Respon Pemerintah

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak ikutan salah satunya adalah terjadinya mobilitas penduduk massal di Kabupaten Gunungkidul. Fenomena ini sama seperti yang terjadi di beberapa wilayah misal di India (Mukhra, Krishan and Kanchan, 2020; Bhagat, 2020) atau di Afrika Selatan (Posel and Casale, 2020). Faktor utama terjadinya mobilitas ini yaitu hilangnya pekerjaan di tempat mereka bekerja sehingga kembali ke daerah asal merupakan pilihan logis (Dandekar and Ghai, 2020; Posel and Casale, 2020; Raharjo dan Isdian, 2020).

Tren mobilitas penduduk di Kabupaten Gunungkidul selama awal pandemi cenderung meningkat. Hal ini diidentifikasi dari jumlah pemudik yang masuk ke Kabupaten Gunungkidul yang berasal dari luar provinsi. Terbanyak para pemudik ini berasal dari zona merah Covid-19 yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat (Wijana, 2020). Berdasarkan data yang terpublikasi, pada akhir Maret 2020 sebanyak 1.188 orang pemudik tiba di Kabupaten Gunungkidul (Wicaksono, 2020). Kemudian meningkat menjadi 7.662 orang pada awal April 2020 (Yuwono, 2020). Selanjutnya jumlah tersebut naik menjadi 11.724 pemudik pada awal Mei 2020 (Wijana, 2020).

Respon pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menghadapi fenomena mobilitas penduduk massal ini sangat baik. Selain menyiapkan posko induk penanganan Covid-19 dan menyiapkan tempat selama isolasi, kegiatan pendataan dan pemetaan penduduk yang melakukan mobilitas juga dilakukan melalui program Sistem Informasi Desa (SID) (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2020; Sangaji, 2020; Suradiyana, 2020). Pendataan dan pemetaan pemudik melalui program SID yang

terdapat di setiap desa ini menjadi nilai positif bagi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan fenomena mobilitas massal yang terjadi. Manfaatnya adalah penduduk Gunungkidul yang melakukan mobilitas penduduk, utamanya migrasi, menjadi terdata. Hal ini sangat penting karena digunakan sebagai data dasar untuk pengambilan kebijakan untuk memberikan berbagai macam perlindungan bagi penduduk baik di daerah asal maupun di daerah tujuan (Alfana, Pitoyo, Rohmah dan Laudiansyah (2020). Sayangnya tidak semua wilayah mampu melakukan pendataan dan pemetaan penduduk ini sehingga penanganan pemudik dan perantau di awal pandemi tidak dapat dilakukan secara optimal. Akibatnya bantuan bagi mereka di beberapa daerah tidak tersampaikan.

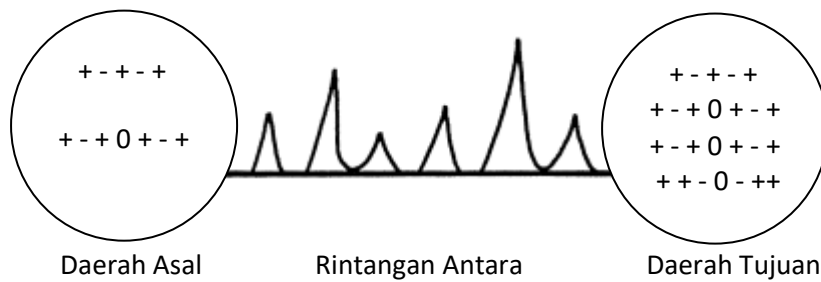
Pemanfaatan Kebijakan Satu Peta Untuk Aspek Mobilitas Penduduk

Kebijakan Satu Peta dimulai sejak 2016 dan saat ini progressnya sangat baik jika merujuk dari Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta Tahun 2016–2020. Dijelaskan dalam laporan tersebut bahwa berbagai luaran telah diselesaikan, diantaranya adalah telah diselesaikannya kompilasi peta tematik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu peta batas administrasi wilayah desa/kelurahan skala 1:10.000 pada Februari 2020. Kompilasi peta batas administrasi wilayah desa/kelurahan tersebut dilakukan di 7 Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota untuk 362 Desa. Ke depan percepatan pembuatan peta batas administrasi wilayah desa/kelurahan dengan memanfaatkan dana desa akan didorong. Oleh karena itu peta batas administrasi wilayah desa/kelurahan dapat segera dibuat oleh semua desa/kelurahan di Indonesia.

Peta batas administrasi wilayah desa/kelurahan dalam kajian mobilitas penduduk memegang peranan penting. Hal ini dikarenakan mobilitas penduduk sangat terikat dengan daerah asal dan daerah tujuan (Lee, 1966). Daerah asal dan daerah tujuan ini jika mampu dipotret sampai level desa/kelurahan tentu nantinya akan menjadi input strategis bagi perkembangan kajian mobilitas penduduk. Hal ini dikarenakan selama ini kajian mobilitas penduduk mayoritas menggunakan unit analisis pada level kabupaten/kota, provinsi atau antar negara (BPS, 2016; BPS, 2018, BPS, 2020).

Luaran dari KSP seperti peta batas administrasi wilayah desa/kelurahan memiliki manfaat yang besar dalam aspek mobilitas penduduk. Luaran lain dari KSP yang mampu memberikan input bagi kajian mobilitas penduduk adalah peta administrasi provinsi, peta administrasi kabupaten/kota dan peta potensi desa. Jika digambarkan dengan teori migrasi Lee (1966) maka untuk peta administrasi desa/kelurahan, peta administrasi provinsi dan peta administrasi kabupaten/kota akan memberikan input pada aspek unit analisis daerah asal dan daerah tujuan penduduk yang melakukan mobilitas penduduk. Sedangkan peta potensi desa akan memberikan input pada aspek keunggulan dan kelemahan daerah asal atau daerah tujuan serta beberapa faktor rintangan antara. Visualisasi tersebut tergambar dalam Gambar 1 dipadukan dengan Tabel 1.

Integrasi dari luaran KSP dan data mobilitas penduduk adalah peta mobilitas penduduk dengan unit analisis sampai level desa/kelurahan. Syaratnya tentu saja data mobilitas penduduk yang baik serta luaran KSP tersebut telah selesai. Jika dapat diintegrasikan maka peta mobilitas penduduk tersebut akan memiliki banyak kemanfaatan. Dalam konteks pandemi Covid-19 misalnya data tersebut dapat dijadikan sebagai dasar *tracking* penduduk sehingga pemerintah daerah asal maupun tujuan dapat melakukan berbagai macam perlindungan bagi para migran. Arus mobilitas penduduk dapat terpantau dan bagi wilayah yang menerapkan “*lockdown*” segala kebutuhan bagi para perantau di daerah tujuan dapat terpenuhi. Akhirnya jika integrasi tersebut dapat dilakukan maka kasus bantaun bagi para perantau yang tidak bisa diberikan dapat diminimalkan.



Gambar 1. Visualisasi Teori Migrasi Lee

Tabel 1. Pemanfaatan Luaran Kebijakan Satu Peta pada Studi Mobilitas Penduduk Merujuk Pada Teori Lee (1966)

Faktor Mobilitas Lee (1966)	Notasi/keterangan	Luaran KSP yang dapat dimanfaatkan
Faktor di daerah asal	Tanda positif negatif di daerah asal yang menyatakan faktor penarik dan pendorong di daerah asal. Misal aset di daerah asal sebagai faktor penarik dan kawasan rawan bencana sebagai faktor pendorong untuk pindah.	1. Peta administasi desa/kelurahan 2. Peta administasi kabupaten/kota 3. Peta administrasi provinsi 4. Peta potensi desa 5. Peta RBI
Faktor di daerah tujuan	Tanda positif negatif di daerah asal yang menyatakan faktor penarik dan pendorong di daerah tujuan. Misal keamanan daerah tujuan sebagai faktor penarik dan terbatasnya pekerjaan di daerah tujuan sebagai faktor pendorong.	1. Peta administasi desa/kelurahan 2. Peta administasi kabupaten/kota 3. Peta administrasi provinsi 4. Peta potensi desa 5. Peta RBI

Sayangnya, pemanfaatan luaran KSP untuk aspek mobilitas penduduk memiliki beberapa tantangan. Pertama adalah data mobilitas penduduk di daerah belum ditata dengan baik. Oleh karenanya pemangku kepentingan perlu untuk membangun data mobilitas penduduk yang baik. Kedua adalah implementasi Kebijakan Satu Peta yang mendukung aspek mobilitas melalui luaran-luaran tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat. Oleh karenanya instruksi presiden tentang percepatan program KSP dengan pemanfaatan dana desa untuk membuat peta administrasi desa/kelurahan perlu segera direalisasikan.

SIMPULAN

Dalam kajian ini, beberapa kesimpulan yang dapat diambil diantaranya:

1. Fenomena mobilitas massal yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul DIY terjadi sebagai dampak Covid-19. Fenomena ini sekaligus menggambarkan pendataan dan pemetaan mobilitas penduduk memiliki peranan penting sebagai dasar penentuan kebijakan.
2. Kebijakan Satu Peta yang diterapkan pemerintah memiliki banyak luaran yang dapat mendukung program pendataan mobilitas penduduk. Luaran tersebut meliputi peta seperti peta RBI skala 1:50.000, peta batas administrasi provinsi skala 1:50.000, peta batas administrasi kabupaten/kota skala 1:50.000, peta

-
- batas administrasi desa/kelurahan skala 1:10.000 dan peta potensi desa minimal pada skala 1:50.000.
3. Pemanfaatan luaran Kebijakan Satu Peta dapat diintegrasikan ke dalam data mobilitas penduduk dengan unit analisis sampai level desa/kelurahan. Jika hal ini diaplikasikan di seluruh daerah maka basis data mobilitas penduduk akan sangat baik. Salah satu manfaat praktisnya, dalam konteks pandemi Covid-19, peta dan data yang telah terintegrasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar *tracking* penduduk sehingga pemerintah daerah asal maupun tujuan dapat melakukan berbagai macam perlindungan bagi para penduduk yang melakukan mobilitas penduduk khususnya bagi para migran/perantau.
 4. Tantangan ke depan untuk pelaksanaan integrasi ini adalah ketersediaan data mobilitas penduduk yang belum baik dan implementasi Kebijakan Satu Peta yang mendukung aspek mobilitas memerlukan waktu yang tidak singkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfana, M. A. F., Pitoyo, A. J., Rohmah, H. N. dan Laudiansyah, R. (2020). Disaster Management Problems in Indonesia: Urgency Of "Migrant Worker" Data Collection, Learning from Conditions During The Covid-19 Pandemic. Permasalahan Manajemen Bencana Di Indonesia: Urgensi Pendataan Para Perantau, Belajar Dari Kondisi Selama Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2020)*. SHEs: Conference Series **3** (1) (2020) 140 – 147 e-ISSN 2620-9292
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Migrasi Jawa Timur Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. ISSN / ISBN : 978-602-438-005-2
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kajian Migrasi Internasional (hasil SP2010 dan SUPAS 2015)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. ISSN / ISBN : 978-602-438-242-1
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. ISSN / ISBN : 2714-8548
- Bhagat, R. B., Reshmi, R. S., Sahoo, H., Roy, A. K., and Gohil, D., (2020). *The COVID-19, Migration and Livelihood in India*. Diakses dari: <https://www.researchgate.net/publication/341756913>.
- Budi, T. (2020). *Diminta Ganjar Mundur, Sekda Blora Akui Tak Miliki Data Perantau*. Diakses dari <https://news.okezone.com/read/2020/05/10/512/2211686/diminta-ganjar-mundur-sekda-blora-akui-tak-miliki-data-perantau>
- Chandra, F. (2020). *Diminta Ganjar Mundur, Sekda Blora Beralih Sulit Data Warga di Perantauan*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5008549/diminta-ganjar-mundur-sekda-blora-beralih-sulit-data-warga-di-perantauan>
- Dandekar, A. and Ghai, R., (2020). Migration and Reverse Migration in the Age of COVID-19. *Economic & Political Weekly*, Vol. **19**, PP. 28- 31.
- Dzulfaroh, A. N. (2020). *Bantuan Sembako untuk Warga Jawa Tengah di Jabodetabek, Ini Cara Aksesnya...* Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/01/135000965/bantuan-sembako-untuk-warga-jawa-tengah-di-jabodetabek-ini-cara-aksesnya?page=all>.
- Ivakhnyuk, I. (2020). Coronavirus pandemic challenges migrants worldwide and in Russia. *Population and Economics* **4** (2): 49-55.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). *Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Tahun 2016–2020*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, **3** (1), 47-57.

-
- Lee, J. N., Mahmud, M., Morduch, J., Ravindran, S. and Shonchoy, A.S. (2020). Migration, externalities, and the diffusion of covid-19 in south asia. *Journal of Public Economics*, **193** (2020), Article 104312
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2020). *Penandatanganan MOU dan Perjanjian Kerjasama UGM dan Pemkab tandai Penggunaan Wisma Wanagama sebagai Rumah karantina Covid-19 Reaktif*. Diakses melalui <https://gunungkidulkab.go.id/D-88a0baef8aff3b0bd65e40c34ee7e294-NW-d88cbb10f4a4309401f17c7b550a90c7-0.html>
- Sangaji. (2020). *Belasan Ribu Pemudik dari Zona Merah Covid-19 Tiba di Gunungkidul*. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/4259031/belasan-ribu-pemudik-dari-zona-merah-covid-19-tiba-di-gunungkidul>
- Suradiyana. 2020. *Dua Posko Induk Penanganan Covid-19 Difungsikan*. Diakses melalui <https://kominfo.gunungkidulkab.go.id/berita-364/dua-posko-induk-penanganan-covid19-difungsikan.html>.
- Mukhra R., Krishan K., Kanchan T. (2020). COVID-19 Sets off Mass Migration in India. *Archives of Medical Research*, **51** (7) , pp. 736-738.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 2020. *Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/1583 Tertanggal 24 Maret 2020 Tentang Pendataan Penduduk Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Gunungkidul Melalui SIDA SAMEKTA*. Wonosari: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- Posel, D., & Casale, D. (2020). Who moves during times of crisis? mobility, living arrangements and COVID-19 in South Africa. Online, *NiDS-CRAM* (National Income Dynamics Study - Coronavirus Rapid Mobile Survey). 8.
- Raharjo, D. B. dan Isdiansyah, B. (2020). *Kena PHK Karena Corona, Nurudin Pilih Mudik karena Tak Ada Pekerjaan*. Diakses melalui <https://www.suara.com/news/2020/04/22/123123/kena-phk-karena-corona-nurudin-pilih-mudik-karena-tak-ada-pekerjaan>
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang* . Jakarta: Republik Indonesia
- Song, W. Y., Zang, P., Ding, Z. X. et al. (2020) Massive migration promotes the early spread of COVID-19 in China: a study based on a scale-free network. *Infect Dis Poverty*. **9**, 109 (2020)
- Vitorio, M. (2020). *Setengah Ton Telur Bansos Pemprov Jabar untuk Warga Depok Membusuk, Ini Penjelasannya*. Diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/29/17262051/setengah-ton-telur-bansos-pemprov-jabar-untuk-warga-depok-membusuk-ini>
- Wicaksono, P. 2020. *Pandemi Corona, 1.188 Perantau Sudah Mudik ke Gunungkidul*. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1324514/pandemi-corona-1-188-perantau-sudah-mudik-ke-gunungkidul/full&view=ok>.
- Wijana, E. P. E. 2020. *Pemudik di Gunungkidul Capai 11.724 Orang, Paling Banyak dari Jakarta*. Diakses melalui <https://jogja.suara.com/read/2020/05/04/090042/pemudik-di-gunungkidul-capai-11724-orang-paling-banyak-dari-jakarta?page=all>
- Yuwono, M. 2020. *Pemudik Hampir 10 Ribu Orang, Gunungkidul Dukung Larangan Mudik*. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2020/04/21/18403631/pemudik-hampir-10-ribu-orang-gunungkidul-dukung-larangan-mudik?page=2>